

EKONOMI BIAYA TINGGI, INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

ABU KOSIM; TAUFIQ

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

This paper attempts to uncover the link between high-cost economy, investment and economic growth. The method used is the study of literature by using data published by the authorities.

Revealed in this paper that in order to overcome the problem of high cost economy, among them needs to be done to minimize the illegal levies and corruption that exist, both within government agencies and non-governmental actors in the environment of investment location, the bureaucracy is too long need to be pruned, one only by imposing licensing under one roof in order to provide fast service, cheap and efficient, there must be certainty of the law in force in the region for investors to feel safe to invest (ex: land, security, etc.), need to review back and revise local regulations that would complicate the parties that want to invest (there is a tendency in the era of regional autonomy under the pretext of increasing revenue, levies appear that legalized).

South Sumatra Province is rich in natural resources in dire need of investment funds to cultivate the potential of natural resources, so as to excavated and beneficial to economic growth and welfare of the people of South Sumatra. Because of the potential that exists in South Sumatra is closely related to the primary sector (agriculture and mining) are strongly associated with the land, the legal certainty regarding land menguasai needs special attention.

Key words : High Cost Economy, Invesment, Economic Growth

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu daerah sangat ditentukan oleh faktor konsumsi dan investasi. Kegiatan investasi akan mendorong kegiatan perekonomian suatu daerah/negara, sehingga sudah sewajarnya daerah/negara melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan masuknya investasi. Manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan suatu investasi yaitu; peningkatan output yang dihasilkan, peningkatan devisa dan penyerapan tenaga kerja serta pada akhirnya akan memacu perekonomian di daerah lokasi investasi tersebut. (<http://www.freelists.org>).

Dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, perekonomian daerah perlu didukung dengan investasi di sektor-sektor produktif dan jasa. Investasi swasta sangat penting karena keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota). Keterbatasan ini akan semakin mempersulit

mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, bila pertumbuhan ekonomi di daerah pun mengandalkan konsumsi masyarakat (Bappenas, 2007)

Pertumbuhan investasi dapat disebabkan oleh investasi oleh masyarakat yang berasal dari tabungan dan aliran modal yang mengalir ke suatu daerah. Aliran investasi tersebut dapat mengalir jika suatu daerah memiliki daya saing dan daya tarik investasi. Daya saing daerah mempunyai arti suatu daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang. Lingkup persaingan tidak lagi hanya dalam wilayah suatu negara, tetapi juga dengan wilayah yang berada di Negara lain. Seiring dengan meningkatnya persaingan global, semua negara dan daerah berlomba-lomba menarik investor domestik maupun asing untuk menanamkan modal di wilayahnya. Pelaku usaha atau investor akan memilih lokasi yang paling memberikan kemudahan dan keuntungan bagi usahanya. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan elemen utama di dalam peningkatan investasi. Keberhasilan suatu negara/daerah menarik investor menggambarkan daya tarik dan daya saing negara/daerah yang bersangkutan. (Bappenas, 2007)

Dampak pengganda yang diciptakan dari peningkatan investasi adalah meningkatnya pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antardaerah, dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mobilitas sumberdaya (bahan mentah, barang modal, dan tenaga kerja) secara lebih mudah dan murah. Percepatan ini juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat (gain) maksimal dari aktivitas tersebut. Dalam situasi ini, pengusaha mendapat keuntungan yang memadai untuk melakukan penambahan modal, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan melakukan ekspansi usaha. Bagi tenaga kerja dorongan kegiatan ekonomi melalui investasi dan perdagangan dapat mengurangi pengangguran dan memperbaiki upah yang mereka terima. Kenaikan upah diharapkan tidak hanya cukup untuk memenuhi Kebutuhan konsumsi tetapi juga meningkatkan kemampuan menabung dan/atau berinvestasi. Bagi pemerintah, meningkatnya aktivitas produksi dan perdagangan, upah dan daya beli berarti meningkatnya penerimaan pajak, yang memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Bappenas, 2007)

Globalisasi yang diikuti oleh meningkatnya arus barang, modal dan jasa antar negara dan antardaerah menyediakan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi sebagai sumber utama pembangunan ekonomi di daerah. Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah adalah menciptakan daya saing dan daya tarik dengan melakukan reformasi birokrasi, membenahi perijinan, menghapuskan berbagai hambatan struktural, stabilitas keamanan, potensi ekonomi, tenaga kerja dan infratsuktur. (Bappenas, 2007)

Salah satu faktor yang diyakini menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah ekonomi biaya tinggi. Karena ekonomi biaya tinggi ini pula negara kita kalah jika harus berkompetisi dalam hal investasi dengan negara-negara tetangga. Ekonomi biaya tinggi adalah proses ekonomi di suatu daerah atau negara yang memerlukan atau mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya akibat adanya pemberlakuan tarif yang lebih tinggi ataupun pungutan-pungutan liar yang seharusnya tidak ada serta sebagai akibat 'budaya korupsi'. Akibat adanya ekonomi biaya tinggi, maka pada akhirnya ekonomi biaya tinggi tersebut akan dikompensasikan terhadap harga jual barang yang terlibat dalam proses ekonomi tersebut, baik produk yang akan diekspor maupun untuk produk-produk yang berbahan mentah impor maupun lokal, akibatnya output harga produknya menjadi kurang kompetitif dipasaran lokal yang sudah dibanjiri produk impor apalagi jika harus bersaing dipasar internasional. Dapatlah disadari bahwa ekonomi biaya tinggi menyebabkan suatu daerah tidak mampu bersaing dengan daerah lain dalam pembangunan ekonominya. (<http://www.freelists.org>).

METODE PENDEKATAN

Tulisan ini mencoba mengungkap keterkaitan antara ekonomi biaya tinggi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Metode pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan data yang dipublikasikan oleh pihak yang berwenang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumsel

Investasi

Pelaksanaan pembangunan di samping dibiayai oleh dana yang berasal dari pemerintah juga bersumber dari dana perbankan yang berasal dari masyarakat. Selama kurun waktu 2003-2007 kredit yang disalurkan oleh perbankan sebagian besar diserap oleh sektor perdagangan, jasa-jasa dan pertanian. (Tabel 1).

Tabel 1. Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sumsel Tahun 2003-2007 (Juta Rupiah)

Sektor Ekonomi	Tahun					% 2007
	2003	2004	2005	2006	2007	
Pertanian	1.505.026	1.717.708	2.092.938	1.898.893	2.043.409	12,33
Pertambangan	30.391	375.138	376.505	321.216	28.725	0,17
Perindustrian	1.360.649	1.509.255	1.841.544	1.544.705	2.480.649	14,96
Perdagangan	1.330.353	2.072.860	2.002.211	2.677.391	3.694.288	22,28
Jasa-jasa	1.034.455	1.374.951	1.774.590	2.302.228	3.070.514	18,52
Lain-lain	2.033.745	2.627.911	3.547.281	4.208.001	5.261.746	31,74

Sumber: BI, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, beberapa tahun penerbitan

Persebaran kredit perbankan untuk tujuan investasi di Propinsi Sumatera Selatan relatif tidak merata. Sebagian besar kredit investasi tersalurkan pada Kota Palembang (56,2%) dan Kabupaten Musi Banyu Asin (21,5%). (Tabel 2).

Tabel 2. Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing untuk Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2003-2007 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun					% 2007
	2003	2004	2005	2006	2007	
Prabumulih	58.739	68.490	80.284	106.351	95.929	3,70
Pagar Alam	943	2.025	5.449	11.956	14.599	0,56
Lubuklinggau	19.008	35.596	37.543	32.255	40.165	1,55
Baturaja	7.601	7.162	8.976	8.703	14.072	0,54
Palembang	699.922	1.136.433	1.344.948	1.468.131	1.458.262	56,19
Ogan Komering Ulu	166.435	211.842	202.817	140.528	140.957	5,43
Ogan Komering Ilir	384.156	414.447	302.239	111.461	102.230	3,94
Musi banyuasin	427.756	407.651	389.901	365.429	558.786	21,53
Musi Rawas	129.885	110.698	103.402	77.879	61.335	2,36
Lahat	23.081	31.482	55.967	16.933	37.791	1,46
Kab/Kota Lainnya	171.575	175.588	164.626	141.986	117.401	2,73

Sumber: BI, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, beberapa tahun penerbitan

Apabila dilihat secara nasional, Sumatera Selatan menempati urutan ke 10 dari 33 Provinsi dalam hal penyerapan jumlah nilai investasi. Jumlah investasi yang ditanam di Sumsel setara 2,88 persen dari total investasi di Indonesia pada tahun 2005.

Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan yang tercermin dalam laju kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama kurun waktu 2001-2007 atas dasar harga konstan 2000 ditampilkan pada tabel 3. Pertumbuhan ekonomi pada tahun terakhir (2007) sebesar 5,84 persen dengan migas, dan 8 persen tanpa migas. Pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi relatif bervariasi, pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor pengangkutan dan komunikasi (14,32%), diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (9,14%), sektor jasa-jasa (9,06%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (9,04%), sektor bangunan (8,11%). Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian (0,25%) dan sektor industri pengolahan (5,7%), lebih jelas terdapat pada tabel 3.

**Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan,
Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2001-2007**

LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
1. PERTANIAN	4.25	4.53	4.98	6.14	5.88	6.44	6.48
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1.84	-0.17	-0.06	0.41	0.42	0.36	0.25
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.73	3.58	4.55	5.87	4.75	5.30	5.70
a. Industri Migas	-1.77	2.17	-0.70	-0.95	-1.34	-1.48	-1.52
b. Industri Tanpa Migas	3.27	4.17	6.71	8.48	6.88	7.49	7.83
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	9.94	4.26	4.15	5.48	6.66	7.48	7.40
5. BANGUNAN	5.00	5.82	6.69	8.56	7.61	7.25	8.11
6. PERD., HOTEL & RESTORAN	4.87	5.54	5.35	6.21	7.73	7.93	9.04
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5.16	6.10	9.68	11.49	11.56	10.56	14.32
a. Pengangkutan	2.92	3.61	7.23	7.86	6.58	6.46	7.01
b. Komunikasi	14.65	15.58	18.05	22.76	25.13	20.08	29.37
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	2.86	4.07	5.27	7.12	7.37	8.26	9.14
9. JASA-JASA	-5.06	3.82	4.65	3.64	6.72	7.90	9.06
a. Pemerintahan Umum	-10.75	2.83	4.31	2.02	6.68	8.27	9.43
b. Swasta	4.88	5.30	5.14	5.97	6.78	7.39	8.54
PDRB DENGAN MIGAS	2.47	3.08	3.68	4.63	4.84	5.20	5.84
PDRB TANPA MIGAS	2.93	4.44	5.74	6.79	6.91	7.31	8.04

Sumber: BPS, PDRB Propinsi Sumatera Selatan Beberapa Tahun Penerbitan

Bila dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi dalam membentuk PDRB dengan migas, maka Propinsi Sumatera Selatan bertumpu pada empat sektor ekonomi, yaitu sektor pertambangan dan penggalian (24,27%), sektor pertanian (20,11%), industri pengolahan (17,74%), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (13,69%), sedangkan sektor-sektor lainnya memberi sumbangan kurang dari 10 persen terhadap pembentukan PDRB. sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. Keempat sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata di atas 70 persen tiap tahunnya, baik dengan migas maupun tanpa migas, (lihat tabel 4 dan 5).

Sumbangan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB tanpa migas sedikit mengalami perbedaan dibandingkan dengan migas. Empat besar penyumbang pembentukan PDRB tanpa migas adalah sektor pertanian (26,39%), sektor industri pengolahan (18,32%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (17,97%), dan sektor jasa-jasa (10%).

Berdasarkan data dari tabel 4 dan 5 dapat dilihat bahwa, berdasarkan struktur ekonomi yang ditinjau dari peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB, selama 8 (delapan) tahun terakhir (2000-2007) dapat diketahui bahwa peranan sektor primer relatif besar, yaitu sebesar 44 persen dengan migas dan 32 persen tanpa migas.

Tabel 4. Distribusi Persentase PDRB Propinsi Sumatera Selatan 2000-2007
Atas Dasar Harga Konstan 2000 dengan Migas

LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
1. PERTANIAN	18.46	18.78	19.04	19.28	19.56	19.76	19.99
2. PERTAMBANGAN & PENGALIAN	31.49	31.30	30.31	29.22	28.04	26.86	25.62
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	17.45	17.32	17.41	17.55	17.76	17.74	17.76
a. Industri Migas	5.35	5.13	5.08	4.87	4.61	4.34	4.06
b. Industri Tanpa Migas	12.10	12.20	12.33	12.69	13.15	13.41	13.70
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0.42	0.45	0.45	0.45	0.46	0.47	0.48
5. BANGUNAN	6.27	6.42	6.59	6.78	7.04	7.22	7.37
6. PERD., HOTEL & RESTORAN	11.66	11.94	12.22	12.42	12.61	12.95	13.29
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	3.19	3.27	3.37	3.56	3.80	4.04	4.25
a. Pengangkutan	2.58	2.59	2.61	2.69	2.78	2.82	2.86
b. Komunikasi	0.61	0.68	0.76	0.87	1.02	1.22	1.39
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	3.47	3.49	3.52	3.57	3.66	3.75	3.86
9. JASA-JASA	7.59	7.03	7.08	7.15	7.08	7.21	7.40
c. Pemerintahan Umum	4.83	4.20	4.19	4.22	4.11	4.19	4.31
d. Swasta	2.77	2.83	2.89	2.93	2.97	3.03	3.09
JUMLAH	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Selatan, PDRB Propinsi Sumatera Selatan, Beberapa tahun penerbitan

Selanjutnya peranan sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa adalah sebesar 30 persen dengan sektor utamanya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,69 persen.

Tabel 5. Distribusi Persentase PDRB Propinsi Sumatera Selatan 2000-2007
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tanpa Migas

LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
1. PERTANIAN	27.26	27.60	27.63	27.43	27.26	27.00	26.78
2. PERTAMBANGAN & PENGALIAN	6.74	6.55	6.27	6.24	6.12	5.96	5.78
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	17.87	17.93	17.88	18.04	18.33	18.33	18.36
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Tanpa Migas	17.87	17.93	17.88	18.04	18.33	18.33	18.36
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0.62	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.64
5. BANGUNAN	9.25	9.44	9.56	9.65	9.81	9.87	9.87
6. PERD., HOTEL & RESTORAN	17.22	17.54	17.73	17.66	17.57	17.70	17.81
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4.71	4.81	4.89	5.07	5.29	5.52	5.69
a. Pengangkutan	3.81	3.81	3.78	3.83	3.87	3.86	3.83
b. Komunikasi	0.90	1.00	1.11	1.23	1.42	1.66	1.86
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	5.13	5.12	5.11	5.08	5.10	5.12	5.17
9. JASA-JASA	11.21	10.34	10.28	10.17	9.87	9.85	9.91
a. Pemerintahan Umum	7.13	6.18	6.08	6.00	5.73	5.72	5.77
b. Swasta	4.08	4.16	4.20	4.17	4.14	4.13	4.14
JUMLAH	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Selatan, PDRB Propinsi Sumatera Selatan, Beberapa tahun penerbitan

Peranan sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 dengan migas sebesar 44 persen. Sedangkan, sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri dan sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan adalah sebesar 26 persen dengan sektor utamanya yaitu sektor industri pengolahan (17.74%).

Jika migas dikeluarkan (PDRB tanpa migas); peran sektor primer sebesar 32 persen, sektor sekunder sebesar 29 persen, sedangkan sektor tersier memberi sumbangan sebesar 39 persen. Dengan komposisi masing-masing sektor seperti dipaparkan di atas, maka perekonomian Propinsi Sumatera Selatan mengarah ke-keseimbangan (komposisi sektor primer, sekunder, dan tersier relatif merata).

Sektor ekonomi yang sudah sejak lama menjadi andalan Propinsi Sumatera Selatan adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Berkembangnya dua sektor andalan Propinsi Sumatera Selatan ini mendorong sektor lainnya untuk berkembang, seperti sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor bangunan, dan sektor jasa-jasa.

Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Nilai penerimaan daerah didominasi oleh penerimaan dari transfer (59,97%), sedangkan sisanya berasal dari PAD (39,7%) dan pendapatan lain-lain (0,3%), lebih lengkap terdapat pada tabel 6.

**Tabel 6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Sumatera Selatan**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Daerah	897,156,597,700.00	847,970,651,231.00
1.1.1	Pajak Daerah	769,430,804,700.00	748,373,444,018.00
1.1.2	Retribusi Daerah	10,211,153,000.00	11,353,175,494.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	30,759,640,000.00	32,977,131,132.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	86,755,000,000.00	55,266,900,587.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,355,864,433,474.00	1,280,897,604,674.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	825,667,433,474.00	770,700,604,674.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	510,197,000,000.00	510,197,000,000.00
1.2.3	Transfer Pemerintah Pusat	20,000,000,000.00	-
1.3	LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8,039,500,000.00	6,963,568,809.00
Jumlah/ Total	2007	2,261,060,531,174.00	2,135,831,824,714.00
	2006	1,706,348,926,286.00	1,867,311,822,134.37

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Selatan, Sumsel dalam Angka, 2008

Porsi PAD dalam Pendapatan Daerah untuk Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel masih relatif rendah, hanya Kota Palembang yang mempunyai PAD lebih dari 10 persen terhadap Pendapatan Daerahnya. Kabupaten/Kota lain mempunyai porsi PAD terhadap pendapatan daerah kurang dari 10 persen. Peran pendapatan daerah lain-lain (misalnya sumbangan pihak ketiga) porsinya relatif tinggi pada beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel.

Penyebab Ekonomi Biaya Tinggi

Ada beberapa penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi antara lain; adanya pungutan liar ataupun korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berhubungan dalam proses ekonomi tersebut, pungutan resmi berdasarkan peraturan tapi pengenaannya berganda dan berlapis-lapis (munculnya pungutan-pungutan yang berlabel meningkatkan PAD). Penyebab lainnya adalah alur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar pula. Selain itu seringkali terjadi ketidakpastian kewenangan dalam memberikan keputusan ataupun perijinan serta kepastian hukum.

Penanggulangan

Menurut penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap persepsi para pengusaha yang mempunyai usaha di daerah baik pengusaha lokal, pengusaha nasional, maupun pengusaha multinasional, maka daya tarik investasi dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu (1) kelembagaan, (2) sosial politik, (3) ekonomi daerah, (4) tenaga kerja dan produktivitas, dan (5) infrastruktur fisik. Lima faktor utama daya tarik investasi ini terkait dengan biaya untuk berinvestasi, baik biaya resmi maupun tidak resmi. Semakin tidak efisien bekerjanya lima faktor tadi maka semakin tidak menarik suatu daerah di mata investor, apalagi bila diyakini akan terjadi ekonomi biaya tinggi.

Berdasarkan kriteria tadi, Kota Palembang menduduki peringkat 39 dari 59 Kota di Indonesia; Kabupaten Musi Banyu Asin menduduki peringkat 3 dari 169 Kabupaten di Indonesia, dan berturut-turut Kabupaten Lahat peringkat 51, Muara Enim peringkat 57, Musi Rawas peringkat 78 dan Ogan Ilir peringkat 91 (KPPOD, 2005). Berdasarkan Survei pemeringkatan iklim usaha di 33 Provinsi pada tahun 2008, Sumatera Selatan tidak masuk peringkat 5 terbaik maupun peringkat 5 terburuk (berada pada posisi menengah). Sumatera Selatan masuk peringkat 5 terbawah untuk aspek upaya pelayanan dunia usaha.

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa Ada beberapa penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi antara lain; adanya pungutan liar ataupun korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berhubungan dalam proses ekonomi tersebut, pungutan resmi berdasarkan peraturan tapi pengenaannya berganda dan berlapis-lapis, alur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, dan seringkali terjadi ketidakpastian kewenangan dalam memberikan keputusan ataupun perijinan serta kepastian hukum.

Untuk itulah sangat mendesak mengharuskan adanya political will dari semua jajaran pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi biaya tinggi, di antaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminimumkan pungutan-pungutan liar dan korupsi yang ada, baik di lingkungan aparat pemerintah maupun oknum non pemerintah yang ada di lingkungan lokasi investasi
2. Memangkas birokrasi yang terlalu panjang, salah satunya dengan memberlakukan perizinan di bawah satu atap untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, murah dan efisien (Pada tingkat Propinsi Sumsel sudah mulai dilakukan; Kabupaten/Kota perlu didorong untuk melakukan hal yang sama)
3. Harus ada kepastian hukum yang berlaku di daerah agar investor dapat merasa aman untuk menanamkan investasinya (misal: lahan, keamanan, dan lain-lain)
4. Perlu meninjau ulang dan merevisi peraturan-peraturan daerah yang justru mempersulit pihak-pihak yang ingin berinvestasi (ada kecenderungan di era otonomi daerah dengan dalih meningkatkan PAD, muncul pungutan-pungutan yang dilegalkan).

PENUTUP

Propinsi Sumatera Selatan yang kaya akan sumberdaya alam sangat membutuhkan dana investasi untuk mengolah potensi SDA, sehingga dapat tergali dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Karena potensi yang ada di

Sumsel sangat terkait dengan sektor primer (pertanian dan pertambangan) yang sangat terkait dengan lahan, maka kepastian hukum tentang menguasai lahan perlu mendapat perhatian khusus.

DAFTAR RUJUKAN

- Bagian Administrasi Perekonomian Sekda Kota Lubuk Linggau, (2009). *Peningkatan Manajemen Investasi Daerah kota Lubuk Linggau*
- Bappenas, (2007). *Buku pegangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 2007*
- BPS Propinsi Sumatera Selatan, *PDRB Propinsi Sumatera Selatan, Beberapa tahun penerbitan*
- BPS Propinsi Sumatera Selatan, (2008). *Sumatera Selatan dalam Angka*
- Bank Indonesia Palembang, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah*
- <http://www.freelists.org>, diakses tanggal 12 Agustus 2009. *Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Biaya Tinggi*
- <http://www.freelists.org>, diakses tanggal 12 Agustus 2009. *Pungli, Ekonomi Biaya Tinggi, dan Otonomi Daerah*
- <http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/022006/15/0608.htm>, diakses tgl 12 Agustus 2009. *Kenaikan TDL, Ekonomi Biaya Tinggi*
- KPPOD, (2008). *Provinsi terbaik bagi penanaman modal; survei pemeringkatan iklim usaha di 33 Propinsi, 2008*
- KPPOD, (2005). *Daya saing investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005*